



AKUNTANSI DESA TORGAMBA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Keyla Revina^{1*}, Ryska Olivia Sirait², Delilas Sastra Sitompul³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, &
Khairani Alawiyah Matondang⁵

^{*1-5} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

*e-Mail: keylarvn@gmail.com

Submit Tgl: 05-April-2025

Diterima Tgl: 05-April-2025

Diterbitkan Tgl: 06-April-2025

Abstract: *This study examines how financial management is carried out at the village level, with a focus on the application of accounting practices, the level of openness in financial reporting, and the challenges encountered during the reporting process in Torgamba Village, South Labuhanbatu Regency. The study also explores how financial activities are organized, recorded, and communicated to relevant stakeholders. A qualitative approach was applied in this research. Data were obtained through online interviews with village officials who are directly involved in managing village finances. These include individuals responsible for financial recording, supervision, and decision-making processes. The findings indicate that financial management in the village has been conducted in a structured manner, supported by the use of a digital system that assists in recording and preparing reports. Information regarding financial activities has also been shared with the community through several channels, reflecting an effort to maintain openness. In addition, accountability is demonstrated through internal review processes and external supervision. However, several issues were identified, including limited technical skills among personnel, inadequate supporting facilities, and inconsistencies in documenting financial transactions. These factors influence the overall effectiveness of financial reporting. In general, the financial management system in Torgamba Village has shown positive progress, although improvements are still needed to enhance performance and ensure better reporting quality in the future.*

Keywords: *Village Finance; Financial Management; Transparency; Accountability; Siskeudes*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan di tingkat desa dengan menitikberatkan pada penerapan praktik akuntansi, tingkat keterbukaan dalam pelaporan keuangan, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses penyusunannya di Desa Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini juga melihat bagaimana kegiatan keuangan direncanakan, dicatat, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara secara daring dengan aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, baik dalam proses pencatatan, pengawasan, maupun pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara terarah dengan dukungan sistem berbasis digital yang membantu proses pencatatan dan penyusunan laporan. Informasi keuangan juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui beberapa media sebagai bentuk keterbukaan. Selain itu, pertanggungjawaban dilakukan melalui proses pemeriksaan internal dan pengawasan dari pihak luar. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparatur, kurangnya fasilitas

pendukung, serta ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan di Desa Torgamba menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan agar kualitas pelaporan dapat lebih optimal di masa mendatang.

Kata kunci: Keuangan Desa; Pengelolaan Keuangan; Transparansi; Akuntabilitas; Siskeudes

Cara mengutip Revina, K., Sirait, R. O., Sitompul, D. S., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2026). Akuntansi Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1674>

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kewenangan desa dalam mengelola keuangan melalui kebijakan dana desa, peran aparatur desa dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana menjadi semakin kompleks. Tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program pembangunan, pemerintah desa juga harus mampu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan sistem yang terstruktur agar informasi keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, sistem akuntansi berperan sebagai alat yang membantu proses pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan sistematis.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian aparatur desa masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur akuntansi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi berbasis digital. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti perangkat teknologi dan jaringan internet juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Di sisi lain, tuntutan terhadap keterbukaan informasi semakin meningkat. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas terhadap penggunaan dana desa. Oleh karena itu, laporan keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa umumnya berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar pengelolaan keuangan yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Desa Torgamba sebagai salah satu desa yang telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangannya menjadi menarik untuk dikaji

lebih lanjut. Penggunaan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada angka, melainkan pada penjelasan mendalam mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan desa berlangsung berdasarkan pengalaman langsung para pelaksana.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Torgamba yang berada dalam wilayah Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang relevan dengan topik penelitian.

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2026. Proses pengambilan data dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui media komunikasi daring, sehingga tetap memungkinkan interaksi antara peneliti dan informan tanpa kehadiran fisik di lokasi.

Informan Penelitian

Pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah aparaturnya desa yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan. Informan tersebut meliputi bendahara desa, kepala desa, serta perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan peran dan pengalaman mereka dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai panduan, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas.

Proses wawancara dilakukan menggunakan media komunikasi video secara daring. Selama kegiatan berlangsung, peneliti juga mencatat poin-poin penting sebagai bahan untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk uraian yang runtut agar lebih mudah dipahami.

Tahap akhir dilakukan dengan menarik makna dari data yang telah disusun, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Akuntansi di Desa Torgamba

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, pengelolaan keuangan di Desa Torgamba telah dijalankan melalui tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan agar penggunaan dana dapat dikontrol dengan lebih baik.

Proses diawali dengan penyusunan rencana kegiatan yang disertai dengan perhitungan anggaran. Dalam tahap ini, pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan unsur lain agar rencana yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perencanaan tersebut, penggunaan dana menjadi lebih terarah dan tidak dilakukan secara spontan.

Pada tahap berikutnya, setiap kegiatan yang telah direncanakan mulai dilaksanakan. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dicatat oleh bendahara desa. Pencatatan dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan media pencatatan sederhana dan melalui bantuan sistem digital. Penggunaan sistem ini membantu mempercepat proses pencatatan serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan.

Setelah seluruh transaksi dicatat, data tersebut kemudian diolah menjadi laporan keuangan. Laporan tidak langsung digunakan, tetapi terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa sistem akuntansi yang diterapkan sudah berjalan dengan pola yang jelas, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa keterbatasan yang memengaruhi efektivitasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Torgamba telah mulai menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Informasi mengenai penggunaan dana tidak hanya disimpan oleh aparatur desa, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai cara.

Salah satu bentuk penyampaian informasi dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan warga. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan serta bagaimana dana digunakan. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui media yang mudah diakses oleh warga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai diberikan ruang untuk mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan tersebut secara tidak langsung dapat mendorong meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Di sisi lain, pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana juga dilakukan melalui proses pemeriksaan yang berlapis. Laporan keuangan yang telah disusun tidak langsung dianggap final, melainkan melalui tahap peninjauan oleh pihak terkait. Bahkan, dalam kondisi tertentu, laporan tersebut juga dapat diperiksa oleh pihak di luar desa.

Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap penggunaan dana tidak hanya dicatat, tetapi juga dapat dijelaskan secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas mulai diterapkan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa aspek.

Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan di Desa Torgamba tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan yang cukup dominan berkaitan dengan kemampuan aparat desa dalam memahami proses pencatatan keuangan. Tidak semua pihak memiliki latar belakang yang mendukung, sehingga diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang digunakan.

Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran pekerjaan. Ketersediaan perangkat serta kualitas jaringan internet yang belum stabil menyebabkan proses pencatatan berbasis digital tidak selalu berjalan optimal. Hal ini terkadang membuat proses penyusunan laporan menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah kebiasaan pencatatan yang belum dilakukan secara langsung saat transaksi terjadi. Beberapa data baru dicatat setelah kegiatan selesai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi sebenarnya.

Tidak hanya itu, kelengkapan dokumen pendukung juga masih menjadi tantangan. Bukti transaksi yang tidak lengkap dapat menyulitkan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Selain itu, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menyebabkan aparat desa belum sepenuhnya memahami prosedur yang berlaku.

Jika dilihat secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem yang digunakan, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas yang tersedia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Torgamba telah dijalankan melalui tahapan yang cukup terarah, mulai dari penyusunan rencana hingga pelaporan. Hal ini menandakan bahwa aparat desa telah berupaya menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa keterbatasan. Dari sisi keterbukaan, pemerintah desa telah mulai memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui beberapa cara, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam hal pertanggungjawaban, laporan keuangan tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan kemampuan aparat, fasilitas yang belum memadai, serta

kebiasaan pencatatan yang belum sepenuhnya tertib. Hal ini memengaruhi kelancaran dalam penyusunan laporan keuangan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan dengan cukup baik, namun masih membutuhkan perbaikan terutama pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sarana pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, A. (2019). *Sistem keuangan desa dan pengelolaan dana desa*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, D. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa*. Jakarta: Rajawali Pers.